

ASN - NON ASN- KOMPETENSI - PENGEMBANGAN

2024

PERGUB NTT NO. 43, BD 2024/NO. 043

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA

- Abstrak :
- Pengembangan Kompetensi merupakan hak dasar bagi seluruh aparatur sipil negara dan nonaparatur sipil negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang kompeten dalam bidang tugasnya masing-masing dan sesuai ketentuan pasal 49 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa setiap pegawai aparatur sipil negara wajib melakukan Pengembangan Kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi, dan Pasal 233 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan Kepala Perangkat Daerah harus memenuhi persyaratan kompetensi dan berdasarkan ketentuan Pasal 210 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pengembangan Kompetensi dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan, maka Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengembangan Kompetensi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 57 Tahun 2021, PP No. 94 Tahun 2021, dan PERMENDAGRI. No. 80 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Nonaparatur Sipil Negara dengan menetapkan ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud penetapan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pengembangan ASN dan Non ASN yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap ASN untuk mendapatkan pelatihan, dan meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia di kalangan ASN dan Non ASN di Provinsi guna peningkatan kinerja dan dapat memberikan pelayanan publik yang baik. Diatur tentang Pengembangan kompetensi; Penyelenggaraan pengembangan kompetensi; Pembiayaan; Pembinaan dan pengawasan dan Ketentuan peralihan.
- Catatan :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Agustus 2024
 - Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tidak berlaku.